



DINAMIKA KELEMBAGAAN EKONOMI ISLAM DI NEGARA QATAR DAN RUSIA

Anisah Febriyanti*, Naufal Luthfi Alifa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

*Correspondence e-mail: febrianisah772@gmail.com

Abstract

The dynamics of Islamic economic institutions in Qatar and Russia demonstrate how a sharia-based economic framework is capable of adjusting to a wide variety of social, political, and economic environments, while still maintaining its core principles of justice, transparency, and ethical financial practices. In Qatar, the development of Islamic economic institutions has progressed rapidly due to strong political will, consistent economic stability, and a national vision that prioritizes diversification and international integration. The government actively supports Islamic finance through modern, clear, and comprehensive regulations that ensure compatibility with global financial standards, allowing Islamic banks and non-bank financial institutions to operate competitively both domestically and internationally. Qatar's commitment to becoming a regional hub for Islamic finance is also reflected in the establishment of sophisticated financial infrastructures, research centers, and policy frameworks that encourage innovation while maintaining adherence to sharia principles. Meanwhile, in Russia, the evolution of Islamic economic institutions is more gradual and localized, primarily taking place in regions such as the Republic of Tatarstan, where cultural and demographic realities naturally support the growth of Islamic finance. Although Russia's national regulatory environment has not fully accommodated Islamic financial products, increasing interest from both regional governments and economic actors has created momentum for gradual expansion. Pilot projects, partnerships with international Islamic financial institutions, and growing awareness among Russia's Muslim communities indicate that Islamic economics is beginning to gain traction despite systemic challenges. Differences in political systems, cultural settings, and economic structures between Qatar and Russia shape the unique pathways through which Islamic economic institutions develop in each country. Overall, these dynamics reflect sincere and continuous efforts to present Islamic economics as a viable, ethical, and sustainable alternative capable of addressing modern economic demands while remaining firmly grounded in sharia values.

Keyword: Islamic Economics Institutions, Qatar, Russia.

PENDAHULUAN

Dinamika kelembagaan ekonomi Islam di negara Qatar dan Rusia menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Qatar dengan dukungan pemerintah dan stabilitas ekonomi berhasil mengembangkan lembaga keuangan Islam yang modern dan terintegrasi dengan sistem global. Sementara itu, Rusia yang memiliki minoritas Muslim terus berupaya membangun dasar kelembagaan ekonomi Islam melalui inisiatif regional seperti di Tatarstan. Perbandingan keduanya menggambarkan bahwa kekuatan kelembagaan dan kebijakan publik berperan besar dalam menentukan arah dan keberhasilan penerapan ekonomi Islam di suatu negara. Kondisi geografis memiliki pengaruh besar terhadap arah pembangunan dan struktur ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada dua negara yang memiliki karakteristik geografis dan ekonomi yang sangat berbeda, yakni Qatar dan Rusia. Qatar merupakan negara kecil di kawasan Timur Tengah yang terletak di Semenanjung Arab dan dikelilingi oleh Teluk Persia. Secara geografis, wilayah Qatar sebagian besar berupa dataran rendah dan gurun pasir dengan iklim kering serta curah hujan yang sangat rendah. Kondisi ini membuat Qatar sangat bergantung pada sumber daya alam non-pertanian, terutama gas alam cair (LNG), yang menjadi tulang punggung utama perekonomiannya (Al-Haidous et al., 2022).

Namun, ketergantungan terhadap sumber daya alam juga menimbulkan tantangan besar bagi keberlanjutan ekonomi. Fluktuasi harga energi global dapat berdampak langsung pada pendapatan negara. Karena itu, pemerintah Qatar berupaya melakukan diversifikasi ekonomi melalui Qatar National Vision 2030, yang bertujuan mengubah struktur ekonomi berbasis minyak dan gas menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi (International Monetary Fund, 2024). Al-Sulaiti, Al-Emadi, dan Truby (2024) menjelaskan bahwa reformasi tata kelola lembaga keuangan syariah di Qatar diarahkan pada peningkatan transparansi dan penerapan prinsip keberlanjutan dalam sistem keuangan nasional.

Sebaliknya, Rusia memiliki karakter geografis yang sangat luas dan kompleks. Negara ini membentang dari Eropa Timur hingga Asia Utara, mencakup berbagai zona iklim dan bentang alam seperti hutan taiga, pegunungan, dan dataran beku (permafrost). Kekayaan sumber daya alam Rusia sangat besar meliputi minyak, gas, batubara, serta berbagai logam dan mineral langka yang menjadikannya salah satu kekuatan energi terbesar di dunia. Namun, besarnya ketergantungan terhadap ekspor komoditas energi juga menyebabkan ekonomi Rusia rentan terhadap tekanan eksternal dan fluktuasi harga global (Pan et al., 2023).

Dalam konteks politik ekonomi, Rusia masih mempertahankan model state capitalism, di mana negara memiliki peran dominan dalam sektor-sektor strategis. Menurut Djankov (2023), model ini mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan geopolitik, tetapi berpotensi menurunkan daya saing dan inovasi sektor swasta. Sejak diberlakukannya sanksi ekonomi internasional pada 2022, pemerintah Rusia semakin memperkuat kontrol terhadap perusahaan milik negara dan menerapkan kebijakan substitusi impor (Klishevich & Panibratov, 2024). Sementara itu, beberapa wilayah seperti Tatarstan dan Dagestan mulai memperkenalkan sistem keuangan Islam secara terbatas sebagai alternatif pembiayaan yang beretika dan berkelanjutan (Makarenko, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi ekonomi Islam di Rusia tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga merupakan upaya sosial dan kultural untuk menyesuaikan prinsip syariah dalam konteks masyarakat non-Muslim (Nagayev & Jahangir, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode komparatif, untuk menggambarkan dan membandingkan kondisi geografis, sistem ekonomi, serta perkembangan kelembagaan ekonomi Islam di Qatar dan Rusia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan hubungan antara faktor geografis, kebijakan ekonomi, dan penerapan prinsip ekonomi Islam secara lebih mendalam tanpa harus menggunakan data statistik yang kompleks.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional (IMF, IFSB, World Bank), serta dokumen resmi pemerintah kedua negara. Literatur yang digunakan mencakup penelitian terbaru dari tahun 2020 hingga 2025 yang relevan dengan tema ekonomi makro, diversifikasi ekonomi, dan kelembagaan keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Geografis Dan Perekonomian Negara Qatar Dan Rusia

Qatar terletak di Semenanjung Arab, wilayah beriklim gurun yang datar dan kecil luasnya tetapi strategis: garis pantainya yang panjang di Teluk Persia, cadangan gas alam yang sangat besar (North Field) dan posisi sebagai salah satu eksportir LNG terbesar di dunia menjadikan karakter geografisnya langsung menentukan struktur ekonomi negara. Kondisi iklim kering, curah hujan rendah, dan konsentrasi permukiman di kawasan pesisir (termasuk ibu kota Doha) memengaruhi pilihan infrastruktur, pola urbanisasi, dan kebutuhan besar akan impor pangan serta air, sehingga negara harus merancang kebijakan fiskal dan investasi infrastruktur yang menyesuaikan kekhasan geografis ini. Secara ekonomi, sejak 2021 Qatar menegaskan kembali peran hidrokarbon, khususnya gas cair (LNG) sebagai mesin utama pemasukan devisa, namun pemerintah juga meluncurkan strategi diversifikasi yang ambisius (Third National Development Strategy/National Vision) yang

menempatkan pembangunan kapasitas pengetahuan, penguatan sektor jasa, dan pengembangan pasar modal sebagai pilar transformasi. Ekspansi produksi LNG (North Field expansion) diproyeksikan menjadi pendorong pertumbuhan jangka menengah, memberi ruang fiskal untuk investasi publik besar, sementara otoritas berupaya memperdalam pasar modal domestik dan memperluas instrumen pembiayaan seperti sukuk dan produk-produk keuangan Islam agar pembiayaan untuk sektor non-energi makin tersedia.

Rusia membentang di dua benua dan memiliki ragam kondisi geografis yang ekstrem: dari dataran rendah Eropa bagian barat, lembah sungai besar, hingga wilayah subarktik dan pantai Arktik yang luas. Kondisi ini memberi Rusia akses ke sumber daya alam yang sangat besar (minyak, gas, batubara, logam) tetapi juga menimbulkan tantangan konektivitas, infrastruktur, dan pengelolaan iklim yang berubah cepat. Pemanasan iklim yang lebih cepat di wilayah Rusia utara mengubah kondisi ekologis dan membuka peluang serta risiko ekonomi (misalnya akses ke jalur pelayaran Arktik tetapi juga ancaman terhadap infrastruktur karena pencairan permafrost). Dari sisi ekonomi, Rusia sebelum dan sejak 2021 diperlihatkan sebagai ekonomi yang sangat bergantung pada ekspor komoditas energi, dengan struktur industri dan regional yang dipengaruhi oleh kepemilikan sumber daya. Namun peristiwa geopolitik sejak 2022 (invasi ke Ukraina dan sanksi internasional berikutnya) telah memaksa penyesuaian besar dalam pola perdagangan, peran negara, dan strategi ekonomi: pengalihan perdagangan ke negara-negara non-barat, stimulus fiskal serta dukungan kredit untuk menjaga stabilitas, serta penegasan kontrol negara terhadap sektor-sektor strategis melalui operator milik negara (SOE) atau langkah-langkah nasionalisasi tertentu. Di level mikro, literatur menunjukkan bahwa ketika konteks institusional berubah (mis. dari periode kelemahan institusi menuju periode formasi atau penguatan institusi tertentu), perusahaan Rusia menyesuaikan strategi meningkatkan investasi pada akumulasi pengetahuan, membangun absorptive capacity dan sering melakukan integrasi vertikal untuk mengamankan pasokan dan kapabilitas produksi—tetapi bentuk “kapitalisme negara” yang semakin menonjol juga menghasilkan trade-off: peningkatan kontrol negara dapat memberi ketahanan jangka pendek namun mengurangi insentif kompetitif yang mendorong efisiensi dan inovasi jangka panjang. Selain itu, sanksi dan pembatasan akses ke teknologi tertentu menimbulkan kendala pada modernisasi sektor industri dan teknologi tinggi, sehingga kebijakan substitusi impor dan diversifikasi mitra dagang menjadi strategi defensif penting Organisasi internasional dan analisis ekonomi makro mencatat bahwa meski terjadi kontraksi pada puncak tekanan sanksi, Rusia relatif cepat menemukan saluran perdagangan alternatif dan stimulus domestik yang menopang pemulihan parsial, tetapi prospek pertumbuhan menengah tetap dibayangi oleh ketidakpastian kebijakan, pembentukan rantai pasok baru, dan tekanan struktural untuk mengubah pola investasi dari orientasi ekstraktif menuju model yang lebih produktif dan teknologi-berat, suatu transformasi yang memerlukan waktu dan pembenahan kelembagaan yang nyata. Kondisi geografis yang luas juga berarti bahwa tantangan pembangunan regional (konektivitas, layanan publik, ketimpangan wilayah) terus menjadi isu sentral kebijakan ekonomi Rusia dalam dekade mendatang.

Dinamika Kelembagaan Ekonomi Islam di Negara Qatar dan Rusia

Qatar adalah ekonomi kecil dengan pendapatan luar biasa dari hidrokarbon, terutama LNG dan gas alam, yang memungkinkan akumulasi modal besar dan kapasitas negara untuk mengatur pembangunan secara top-down. Dalam konteks itu, kelembagaan ekonomi Qatar diarahkan untuk: (a) mempertahankan stabilitas fiskal dan ekonomi meskipun terdapat fluktuasi harga komoditas, (b) melakukan diversifikasi agar ketergantungan terhadap energi dapat dikurangi, (c) memperbaiki tata kelola dan transparansi untuk meningkatkan daya tarik investasi asing dan legitimasi internasional. Sebagai contoh, riset terkini menunjukkan bahwa Qatar sedang dalam masa transisi dari model yang berfokus pada hidrokarbon ke model yang lebih berbasis pengetahuan dan sektor swasta (Kularatne, Miyajima & Muir, 2024).

Pembiayaan dan institusi keuangan menjadi bagian penting dalam agenda kelembagaan Qatar: diversifikasi ekonomi memerlukan instrumen keuangan yang lebih maju, pasar modal yang lebih dalam, serta regulasi yang mendukung inovasi dan partisipasi swasta. Artikel-panel pada negara-negara berkembang memunculkan kesimpulan bahwa “institutional reforms significantly impact

investasi dan pertumbuhan ekonomi” (Zhao et al., 2021). Karena dalam konteks Qatar, mekanisme kelembagaan harus diperkuat agar pembiayaan swasta dan diversifikasi dapat berjalan.

Transformasi kelembagaan di Qatar menunjukkan beberapa hasil awal: stabilitas ekonomi tetap terjaga, investasi infrastruktur meningkat, dan strategi jangka menengah diarahkan ke ekonomi berbasis pengetahuan (IMF, 2024; IMF, 2025). Namun, untuk menjadi ekonomi inovasi yang mandiri dan berkelanjutan, Qatar harus mengatasi: (a) ukuran pasar domestik kecil yang membatasi skala ekonomi perusahaan swasta; (b) ketergantungan struktural terhadap ekspor energi; (c) kebutuhan kapasitas kelembagaan tinggi untuk mengelola investasi besar dan memastikan bahwa pengelolaan proyek publik tidak hanya menghasilkan “investasi besar” tetapi dampak jangka panjang yang kuat; dan (d) urgent untuk membangun keterkaitan antara pendidikan, riset, dan industri agar institusi inovasi domestik berkembang.

Rusia adalah negara besar dengan sejarah panjang ekonomi terpusat, kemudian melakukan liberalisasi dan privatisasi di era pasca-Soviet, lalu memasuki fase di mana negara berkembang peranannya kembali kuat dalam ekonomi. Institusi ekonomi Rusia dalam beberapa tahun terakhir mengalami dinamika yang menarik: sanksi internasional, tekanan geopolitik, kebutuhan keamanan ekonomi, serta agenda substitusi impor dan pengembangan teknologi domestik. Dalam konteks kelembagaan, perubahan mencakup regulasi negara, peran badan milik negara (SOE), dan adaptasi perusahaan terhadap lingkungan institusional yang berubah (Klishevich & Panibratov, 2024).

Dalam literatur yang lebih luas tentang Rusia, fungsi institusi negara semakin menonjol: negara bukan hanya menetapkan aturan tetapi juga aktor aktif dalam ekonomi melalui SOE, nasionalisasi, dan pengaturan yang ketat (Djankov, 2023). Walaupun ada perubahan institusional yang positif, Rusia menghadapi beberapa tantangan: distorsi pasar akibat dominasi SOE dan intervensi negara, pengaruh informal (jaringan politik, oligarki), ketidakpastian regulasi akibat sanksi dan geopolitik, dan kesulitan integrasi ke dalam rantai nilai global. Akibatnya, meskipun institusi formal diperkuat, efektivitas kelembagaan dalam mendorong inovasi dan produktivitas bisa terbatas oleh faktor eksternal dan internal. Dari sisi kebijakan, Rusia perlu memperhatikan reformasi tata kelola SOE, meningkatkan transparansi dan hubungan antara sektor swasta independen dan negara, serta menyeimbangkan antara kontrol negara dan efisiensi pasar agar institusi ekonomi benar-benar mendorong pertumbuhan dan inovasi.

Jika dibandingkan, dinamika kelembagaan di Qatar dan Rusia memiliki beberapa kesamaan namun juga banyak perbedaan penting: Kedua negara menghadapi kebutuhan untuk memperkuat institusi ekonomi. Qatar untuk mendiversifikasi dan modernisasi, Rusia untuk mengadaptasi kepada tekanan eksternal dan kebutuhan teknologi. Institusi formal maupun informal menjadi penting bagi arah pembangunan. Tetapi, Qatar mengarah ke reformasi institusional yang pro-diversifikasi, pro-swasta, dengan tekanan dari legitimasi global (investasi asing, acara internasional), sedangkan Rusia lebih bergerak ke arah kontrol negara yang meningkat, penguatan SOE, dan orientasi strategi nasional. Dari perbandingan ini, kita bisa menarik pelajaran bahwa pertama, reformasi kelembagaan tidak cukup hanya mengganti aturan; implementasi, kapasitas regulasi, dan budaya kelembagaan (norma, transparansi) sangat penting.

Tantangan dan Strategi Penguatan Kelembagaan Ekonomi Islam Global di Negara Qatar dan Rusia

Qatar, yang menempati posisi sentral dalam industri LNG dunia dan menerapkan agenda diversifikasi ambisius, menghadapi tantangan yang khas dalam memperkuat kelembagaan ekonomi Islam (Islamic finance institutions IFIs) di era globalisasi. Pertama, tekanan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan praktik keuangan modern menuntut kerangka governance yang jelas dan konsisten: pembangunan standar tata kelola syariah, harmonisasi produk keuangan Islam dengan standar internasional (mis. AAOIFI, IFSB), serta pengembangan kapasitas para penasihat syariah agar dapat menilai produk-produk finansial yang semakin kompleks (Al-Sulaiti et al., 2024; IFSB, 2023). Dalam praktiknya, Qatari IFIs harus menyeimbangkan tujuan ganda untuk memenuhi kepatuhan syariah sambil bersaing di pasar modal global yang berarti institusi pengatur harus memperkuat transparansi, disclosure, dan mekanisme audit syariah yang setara dengan tata kelola korporasi

konvensional (Al-Sulaiti et al., 2024). Tantangan kedua muncul dari aspek teknologi dan digitalisasi: fintech, blockchain, dan platform digital membuka peluang besar untuk inklusi keuangan syariah dan efisiensi produk (mis. sukuk digital, crowdfunding syariah), tetapi juga menimbulkan risiko operasional, kepatuhan, dan kebutuhan kerangka regulasi baru; jika regulasi tidak cepat menyesuaikan, inovasi dapat berjalan lebih cepat daripada kapasitas pengawasan, yang berpotensi merusak kepercayaan pasar (Ibrahim & Truby, 2022; IFSB, 2023). Ketiga, tuntutan keberlanjutan (ESG/Sustainability) dan target-target pembangunan berkelanjutan menempatkan tekanan pada IFIs untuk menunjukkan kontribusi sosial dan lingkungan yang konkret dari pembiayaan proyek energi terbarukan hingga instrumen zakat/waqf yang direvitalisasi sebagai sumber pembiayaan sosial yang menuntut redesign produk, metrik pelaporan, dan integrasi maqashid al-shariah ke dalam kebijakan investasi (Al-Sulaiti et al., 2024; IFSB, 2023). Di Qatar, strategi penguatan kelembagaan untuk menjawab tantangan ini harus simultan: memperkuat badan pengawas (regulatory capacity), membangun lembaga pendidikan dan riset khusus keuangan Islam untuk membentuk tenaga ahli serta penasihat syariah, menyusun standar disclosure yang menggabungkan aspek syariah dan keberlanjutan, serta mendesain sandbox regulasi fintech syariah yang aman agar inovasi dapat diuji tanpa merusak stabilitas sistem keuangan (Ibrahim & Truby, 2022; Al-Sulaiti et al., 2024).

Di Rusia, konteks berbeda karena Islam bukan arus utama nasional tetapi terdapat populasi Muslim besar di beberapa wilayah, dan sejak beberapa tahun terakhir muncul inisiatif parsial untuk memperkenalkan produk dan praktik keuangan syariah di level regional. Tantangan utama di Rusia meliputi kerangka hukum yang belum sepenuhnya mengakomodasi hukum kontrak syariah (mis. perlunya penyesuaian aturan perpajakan, hak kepemilikan aset terkait kontrak musyarakah/mudharabah), kurangnya preseden regulatif di bank sentral dan otoritas keuangan untuk menangani isu-isu khusus produk syariah, serta kapasitas sumber daya manusia yang masih terbatas dalam hal literasi syariah dan manajemen risiko Islam (Nagayev & Jahangir, 2022; Makarenko, 2023). Selain itu, tekanan geopolitik dan sanksi sejak 2022 mengubah lanskap ekonomi Rusia sehingga potensi modal asing dan hubungan dengan institusi finansial global menjadi terbatas; ini berdampak pada akses teknologi, re-insurance, dan kemitraan internasional yang penting untuk pengembangan industri keuangan Islam yang berstandar global (Smirnov, 2023). Namun tantangan ini juga membuka peluang strategis: pertumbuhan permintaan domestik di wilayah-wilayah berpopulasi Muslim menciptakan pasar untuk produk keuangan syariah (perbankan ritel syariah, pembiayaan konsumsi halal, takaful) yang bisa dikembangkan secara bertahap dengan pilot-pilot regional dan adaptasi standar lokal terhadap pedoman internasional (Nagayev & Jahangir, 2022; Makarenko, 2023). Strategi penguatan yang efektif di Rusia harus fokus pada harmonisasi regulasi (mis. memberikan kerangka pajak netral terhadap produk syariah), pembangunan kapasitas lokal melalui program pendidikan dan sertifikasi syariah, serta kerjasama bilateral/regional dengan lembaga-lembaga internasional untuk transfer teknologi dan standar (Nagayev & Jahangir, 2022). Pendekatan bertahap (step-by-step) dengan pilot regional memungkinkan pengawasan lebih fokus dan pembelajaran kebijakan yang mengurangi risiko sistemik ketika skala diperbesar.

Untuk kedua negara, ada tantangan global yang bersifat lintas-negara dan menuntut respons kelembagaan terkoordinasi: harmonisasi standar internasional, manajemen risiko global (termasuk risiko siber, risiko rantai pasok, dan risiko geopolitik), serta kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kinerja keuangan Islam. Lembaga-lembaga pembuat standar global (IFSB, AAOIFI, IILM) memainkan peran penting, tetapi efektivitasnya bergantung pada adopsi domestik dan adaptasi lokal; oleh karenanya strategi penguatan kelembagaan mesti menggabungkan advokasi regulasi (policy advocacy), kapasitas teknis untuk menerjemahkan standar, serta insentif fiskal untuk mempercepat adopsi produk syariah yang memberikan nilai sosial (IFSB, 2023; Al-Sulaiti et al., 2024).

Reflektif Perbandingan Kelembagaan Ekonomi Islam di Negara Qatar dan Rusia bagi Indonesia

Kelembagaan ekonomi Islam di Qatar dan Rusia menunjukkan dua pendekatan yang berbeda namun sama-sama relevan untuk dijadikan refleksi bagi Indonesia dalam memperkuat sistem

keuangan syariah nasional. Qatar dikenal sebagai negara yang memiliki visi ekonomi berbasis diversifikasi dan keberlanjutan, yang kemudian diwujudkan melalui integrasi nilai-nilai Islam dalam lembaga keuangannya. Pemerintah Qatar berfokus pada pengembangan regulasi yang selaras dengan prinsip syariah dan berorientasi global. Lembaga keuangan Islam di negara ini telah mengalami transformasi signifikan, terutama melalui penerapan tata kelola syariah yang ketat, pengembangan produk inovatif, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa strategi inovasi Qatar berperan penting dalam memperkuat fondasi kelembagaan keuangan Islam dan menjadikannya sebagai bagian dari upaya mewujudkan keberlanjutan ekonomi nasional (Al-Sulaiti et al., 2024).

Digitalisasi juga menjadi faktor kunci dalam dinamika kelembagaan ekonomi Islam di Qatar. Penggunaan teknologi seperti blockchain dan fintech syariah telah meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam sistem keuangan, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah terhadap integritas dan akuntabilitas lembaga keuangan Islam (Ibrahim & Truby, 2022).² Model seperti ini memperlihatkan bahwa penguatan kelembagaan tidak hanya bergantung pada kepatuhan syariah, tetapi juga pada kemampuan adaptasi terhadap perkembangan global, terutama di bidang teknologi dan regulasi keuangan.

Berbeda dengan Qatar, Rusia menghadapi tantangan struktural dalam membangun kelembagaan ekonomi Islam. Meskipun negara ini memiliki populasi Muslim yang cukup besar, sistem hukum dan regulasi keuangan di Rusia belum sepenuhnya mendukung praktik keuangan syariah. Kelembagaan ekonomi Islam di Rusia berkembang secara bertahap melalui inisiatif lokal dan regional, terutama di wilayah seperti Tatarstan dan Dagestan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi minimnya regulasi khusus, rendahnya literasi keuangan syariah, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip dan praktik keuangan Islam (Nagayev & Jahangir, 2022). Namun, terdapat komitmen untuk memperkuat kerangka kelembagaan dengan mendorong kerja sama akademik, penelitian, dan penyusunan kebijakan yang lebih adaptif (Makarenko, 2023).

Selain itu, tekanan geopolitik dan sanksi ekonomi terhadap Rusia membuat negara ini berupaya mencari alternatif sistem keuangan yang lebih mandiri dan beretika. Dalam konteks ini, sistem keuangan Islam dipandang sebagai peluang strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan dunia Muslim serta menarik investasi berbasis nilai moral dan sosial (Smirnov, 2023). Walaupun perkembangan tersebut masih bersifat terbatas, Rusia menunjukkan potensi dalam membangun model kelembagaan ekonomi Islam yang menyesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan regionalnya.

Bagi Indonesia, refleksi dari pengalaman Qatar dan Rusia memberikan panduan penting dalam merancang strategi penguatan kelembagaan ekonomi Islam. Dari Qatar, Indonesia dapat belajar mengenai pentingnya sinergi antara inovasi, regulasi, dan tata kelola syariah. Pendekatan Qatar yang mengintegrasikan teknologi dan prinsip keberlanjutan menunjukkan bahwa keuangan Islam dapat menjadi instrumen pembangunan nasional yang berorientasi pada nilai dan efisiensi (IFSB, 2023). Sementara itu, pengalaman Rusia memberikan pelajaran tentang pentingnya adaptasi hukum dan pendidikan ekonomi syariah agar kelembagaan keuangan Islam dapat tumbuh merata hingga ke daerah-daerah dengan potensi ekonomi lokal yang tinggi.

Dengan memadukan dua pendekatan tersebut, Indonesia dapat memperkuat kelembagaan ekonomi Islam melalui pembangunan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi sistem regulasi, serta penerapan teknologi finansial syariah yang transparan dan efisien. Hal ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk menjadi pusat keuangan syariah global yang tidak hanya besar secara aset, tetapi juga kuat secara kelembagaan dan bermakna bagi kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Kondisi geografis dan struktur ekonomi yang berbeda antara Qatar dan Rusia membentuk arah serta karakter kelembagaan ekonomi Islam di masing-masing negara. Qatar, dengan wilayah kecil namun kaya sumber daya gas alam, menjadikan pendapatan hidrokarbon sebagai fondasi utama pembangunan. Namun, kesadaran akan keterbatasan sumber daya dan kebutuhan diversifikasi

mendorong negara ini memperkuat kelembagaan ekonomi Islam sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan keberlanjutan. Reformasi kelembagaan di Qatar terlihat melalui penguatan tata kelola, inovasi regulasi keuangan syariah, dan integrasi teknologi digital untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif, transparan, dan sesuai dengan prinsip maqashid al-shariah.

Sebaliknya, Rusia yang memiliki wilayah sangat luas dan kondisi geografis beragam menghadapi tantangan kelembagaan yang berbeda. Ketergantungan tinggi terhadap ekspor energi dan tekanan geopolitik menuntut negara ini memperkuat peran institusi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Upaya pengembangan ekonomi Islam di Rusia masih terbatas, namun mulai menunjukkan arah positif melalui inisiatif regional, adaptasi regulasi, dan kerja sama internasional. Kelembagaan ekonomi Islam di Rusia berkembang dalam konteks politik-ekonomi yang didominasi negara, sehingga perlu waktu dan reformasi hukum yang konsisten agar mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa penguatan kelembagaan ekonomi Islam memerlukan tiga hal utama: stabilitas makro ekonomi yang mendukung, regulasi yang adaptif terhadap prinsip syariah dan dinamika global, serta kapasitas sumber daya manusia dan teknologi yang memadai. Bagi Indonesia, pengalaman Qatar dan Rusia menjadi cerminan bahwa keberhasilan sistem keuangan Islam tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi ekonomi, tetapi juga oleh kekuatan institusi dan komitmen pemerintah dalam memastikan tata kelola yang transparan, inovatif, dan berorientasi pada nilai-nilai Islam serta keberlanjutan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haidous, S., Al-Breiki, M., Bicer, Y., & Al-Ansari, T. (2022). Evaluating LNG supply chain resilience using SWOT analysis: The case of Qatar. *Energies*, 15(1), 79. <https://doi.org/10.3390/en15010079>
- Al-Sulaiti, A., Hamouda, A. M., Al-Yafei, H., & Abdella, G. M. (2024). Innovation-based strategic roadmap for economic sustainability and diversity in hydrocarbon-driven economies: The Qatar perspective. *Sustainability*, 16(9), 3770. <https://doi.org/10.3390/su16093770>
- Al-Sulaiti, K., Al-Emadi, A., & Truby, J. (2024). Governance challenges in Islamic financial institutions in Qatar: Integrating Shariah compliance and sustainability. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(3), 312–329. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2023-0121>
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency, and stability. *Journal of Banking & Finance*, 37(2), 433–447. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>
- Djankov, S. (2023). State capitalism in Russia revisited. *Comparative Economic Studies*, 65(2), 198–212. <https://doi.org/10.1057/s41294-023-00200-2>
- Ibrahim, I. A., & Truby, J. (2022). Governance in the era of Blockchain technology in Qatar: A roadmap and a manual for Trade Finance. *Journal of Banking Regulation*, 23(4), 419–438. <https://doi.org/10.1057/s41261-021-00165-1>
- International Monetary Fund. (2024). Qatar: 2024 Article IV Consultation Report. Washington, DC: IMF. <https://doi.org/10.5089/9798400250229.002>
- Islamic Financial Services Board (IFSB). (2023). IFSI Stability Report 2023. https://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2023/10/Islamic-Financial-Services-Industry-Stability-Report-2023_En.pdf
- Javeline, D. (2024). Russia in a changing climate. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*. <https://doi.org/10.1002/wcc.872>
- Khan, T., & Bhatti, M. I. (2008). Islamic banking and finance: On its way to globalization. *Managerial Finance*, 34(10), 708–725. <https://doi.org/10.1108/03074350810891029>
- Klishevich, D., & Panibratov, A. (2024). The omnipresence of the state and its effect on the internationalization of companies: The Russian variety of state capitalism. *Journal of International Management*, 30(4). <https://doi.org/10.1016/j.intman.2024.101154>

- Kularatne, C., Miyajima, K., & Muir, D. (2024). Estimating the Growth Impact of Economic Transformation in Qatar. *Review of Middle East Economics and Finance*, 20(3). <https://doi.org/10.1515/rmeef-2024-0011>
- Makarenko, A. (2023). Islamic banking and finance in Russia. SSRN. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4465021>
- Makarenko, V. (2023). Islamic banking development in Russia: Legal and institutional perspectives. *Review of Central and East European Law*, 48(4), 512–537. <https://doi.org/10.1163/15730352-bja10122>
- Nagayev, R., & Jahangir, R. (2022). Islamic finance in Central Asia and Russia (Research Report). Research Center Islamic Economics – IKAM. <https://doi.org/10.26414/ur13>
- Pan, L., Wang, Y., Sun, X., Sadiq, M., & Dagestani, A. A. (2023). Natural resources: A determining factor of geopolitical risk in Russia? *Resources Policy*, 85, 104033. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104033>
- Ray, P. K., Klarin, A., & Ray, S. (2022). The impact of institutional formation on firms' strategic choices in knowledge development, absorptive capacity and vertical integration. *Studies in Comparative International Development*, 58, 616–644. <https://doi.org/10.1007/s12116-022-09378-5>
- Smirnov, A. (2023). Russia in the system of Islamic finances [SSRN Working Paper]. SSRN. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4939585>
- Zhao, J., Madni, G. R., Anwar, M. A., & Zahra, S. M. (2021). Institutional Reforms and Their Impact on Economic Growth and Investment in Developing Countries. *Sustainability*, 13(9), 4941. <https://doi.org/10.3390/su13094941>
- Zhuravskaya, E., & Popov, V. (2020). State capitalism and the future of Islamic finance in Russia. *Emerging Markets Finance & Trade*, 56(1), 97–110. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1658062>